

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan (agency theory) membicarakan tentang adanya hubungan keagenan antara principal dan agen. Perspektif hubungan keagenan menjadi dasar yang dipakai untuk mengetahui corporate governance dan earnings management. Hubungan keagenan terlukis antara pihak manajemen (agen) dengan investor (prinsipal).

Manajemen laba yakni suatu keterampilan untuk memanipulasi pilihan-pilihan yang terdapat dan memungut pilihan yang tepat guna dapat menjangkau tingkat laba yang diharapkan (Belkaoui, 2004). Definisi manajemen laba juga diajukan oleh (Belkaoui, 2004) yang menyaksikan manajemen laba sebagai sebuah intervensi yang disengaja pada proses pelaporan eksternal dengan maksud guna mendapatkan sejumlah keuntungan pribadi. (Scott, 2006) membagi pola manajemen laba menjadi empat:

1. Taking a bath

Pola ini terjadi ketika reorganisasi termasuk pelantikan CEO baru dengan mengadakan kerugian dalam jumlah besar. Tindakan ini diinginkan dapat menambah laba di masa datang

2. Income maximization

Manajer perusahaan mengadakan net income yang tinggi untuk destinasi mendapatkan bonus. Income maximization dilaksanakan saat perusahaan merasakan penurunan laba.

3. Income smoothing

Income smoothing adalah salah satu pola manajemen laba yang dilaksanakan dengan teknik meratakan pendapatan laba yang perusahaan sampai-sampai laba yang didapatkan tidak terlampau berfluktuasi. (Chariri dan Ghazali, 2007) mengemukakan dua dalil yang dipakai manajemen untuk mengerjakan income smoothing. Alasan kesatu didasarkan pada asumsi bahwa pola laba periodik yang stabil dapat menyokong tingkat dividen yang lebih tinggi dibandingkan pola laba periodik yang berfluktuasi. Kedua, sehubungan dengan upaya meratakan keterampilan untuk mengantisipasi pola ketidakstabilan laba periodik.

Teknik dan pola manajemen laba menurut keterangan dari Rahmawati dan Qomariyah (2006) dapat dilaksanakan dengan tiga kiat yaitu:

a. Memanfaatkan kesempatan untuk membuat perkiraan akuntansi. Cara manajemen memprovokasi laba melewati judgment (perkiraan) terhadap perkiraan akuntansi antara lain perkiraan tingkat piutang tak tertagih, perkiraan kurun masa-masa depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, dan lain-lain.

b. Mengubah cara akuntansi

Perubahan cara akuntansi yang dipakai untuk menulis suatu transaksi, misal : merubah cara depresiasi aktiva tetap, dari metode depresiasi angka tahun ke cara depresiasi garis lurus.

c. Menggeser periode ongkos atau pendapatan

Contoh rekayasa periode ongkos atau penghasilan antara lain: mempercepat/menunda pengeluaran untuk riset dan pengembangan hingga pada periode akuntansi berikutnya, mempercepat/menunda pengeluaran promosi hingga periode berikutnya, mempercepat/menunda ekspedisi produk ke pelanggan, mengatur ketika penjualan aktiva

tetap yang telah tak dipakai. Motivasi yang melatarbelakangi terjadinya praktik manajemen laba yang dilaksanakan oleh manajer, antara lain:

1) Bonus Purposes

Manajer yang lebih memahami informasi mengenai laba perusahaan dikomparasikan dengan pemegang saham cenderung mempunyai sifat mementingkan diri sendiri dan mengerjakan tindakan manajemen laba guna memaksimalkan laba ketika ini dengan destinasi untuk menemukan insentif berupa bonus.

2) Political Motivations

Manajemen laba dipakai untuk meminimalisir laba yang diadukan pada perusahaan public. Perusahaan ingin mengurangi laba yang diadukan karena adanya desakan publik yang menyebabkan pemerintah memutuskan peraturan yang lebih ketat

3) Taxation Motivations

Taxation Motivation dilaksanakan perusahaan dengan destinasi penghematan pajak. Manajemen laba dilaksanakan untuk memperkecil pendapatan laba sehingga menyebabkan pajak yang dibayarkan untuk pemerintah pun lebih kecil dari yang seharusnya

4) Pergantian CEO

Manajemen laba yang dilaksanakan oleh CEO yang sudah mendekati masa pensiunnya seringkali dilakukan dengan menaikkan laba dengan destinasi mendapatkan bonus

5) Initial Public Offering (IPO)

Perusahaan yang baru kesatu kali mengerjakan penawaran sahamnya dan belum mempunyai nilai pasar mempunyai kecenderungan untuk mengerjakan manajemen laba dengan asa dapat mendongkrak harga saham perusahaan di masa yang bakal datang.

6) Pentingnya Memberi Informasi Kepada Investor

Segala informasi yang sehubungan dengan perusahaan mesti dikatakan oleh manajer untuk investor sebagai format tanggungjawab manajer. Oleh sebab itu, pelaporan laba perlu diciptakan sedemikian rupa sampai-sampai investor tetap menilai bahwa perusahaan mempunyai kinerja yang baik cocok keinginan. Berdasarkan keterangan dari Watt dan Zimmerman (dalam Priantinah, 2009) dalam positive accounting theory ada tiga hipotesis yang melatar belakangi terjadinya manajemen laba, yakni :

1. The bonus plan hypothesis

Manajer perusahaan menyerahkan bonus besar menurut earnings yang lebih tidak sedikit menggunakan cara akuntansi yang dapat menambah laba yang dilaporkan. Pada perusahaan yang mempunyai rencana pemberian bonus, manajer perusahaan bakal lebih memilih cara akuntansi yang bisa menggeser laba dari masa depan ke masa sekarang sehingga dapat mendongkrak laba ketika ini. Hal ini disebabkan manajer lebih menyenangi pemberian upah yang lebih tinggi guna masa kini. Dalam kontrak bonus dikenal dua istilah yakni bogey (tingkat laba terendah guna mendapatkan bonus) dan cap (tingkat laba tertinggi). Jika laba sedang di bawah bogey, tidak ada bonus yang didapatkan manajer sedangkan andai laba sedang di atas cap, manajer tidak bakal mendapat bonus tambahan. Jika laba bersih sedang di bawah bogey, manajer ingin memperkecil laba dengan harapan mendapat bonus lebih banyak pada periode berikutnya, begitu pula jika laba sedang di atas cap. Jadi hanya jika laba bersih berada salah satu bogey dan cap, manajer akan berjuang menaikkan laba bersih perusahaan.

2. The debt covenant hypothesis

Pada perusahaan yang memiliki rasio debt to equity tinggi, manajer perusahaan ingin menggunakan cara akuntansi yang dapat menambah pendapatan atau laba. Perusahaan

dengan rasio debt to equity yang tinggi bakal mengalami kendala dalam mendapatkan dana ekstra dari pihak kreditor bahkan perusahaan dalam bahaya melanggar perjanjian utang.

3. The political cost hypothesis

Pada perusahaan besar yang memiliki ongkos politik tinggi, manajer bakal lebih memilih cara akuntansi yang menanggukkan laba yang diadukan dari periode kini ke periode masa depan sehingga bisa memperkecil laba yang dilaporkan. Biaya politik hadir dikarenakan profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat unik perhatian media dan konsumen.

Governance ialah suatu proses dan struktur yang dipakai oleh organisasi perusahaan guna menyerahkan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang untuk pemegang saham, dengan tetap menyimak kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan ketentuan perundangan dan norma yang berlaku. Corporate governance mesti diterapkan oleh perusahaan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, independensi, keadilan. Corporate governance bertujuan untuk membuat nilai tambah untuk pihak-pihak pemegang kepentingan (Almilia dan Sifa, 2006). Berdasarkan keterangan dari Hastuti (2005) ada empat prinsip dasar pengelolaan perusahaan yang baik. Keempat prinsip tersebut ialah :

- 1) Keadilan (fairness) yang mencakup :
 - a) Perlindungan untuk seluruh hak pemegang saham.
 - b) Perlakuan yang sama untuk para pemegang saham.
- 2) Transparansi (transparency) yang meliputi:
 - a) Pengungkapan informasi yang mempunyai sifat penting.
 - b) Informasi mesti disiapkan, diaudit, diungkapkan dengan pembukuan berkualitas.
 - c) Penyebaran informasi mesti mempunyai sifat adil, tepat masa-masa dan efisien.
- 3) Dapat dipertanggung jawabkan (accountability) yang mencakup meliputi:

- a) Dewan direksi beraksi mewakili kepentingan perusahaan dan pemegang saham.
 - b) Penilaian yang mempunyai sifat independen terlepas dari manajemen.
 - c) Akses terhadap informasi secara akurat, relevan dan tepat waktu.
- 4) Pertanggungjawaban (responsibility) meliputi
- a) Menjamin dihormatinya segala hak pihak-pihak yang berkepentingan.
 - b) Para pihak yang berkepentingan mesti mempunyai peluang untuk menemukan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak hak mereka.
 - c) Dibukanya mekanisme pengembangan prestasi untuk pihak yang berkepentingan.
 - d) Jika diperlukan, semua pihak yang berkepentingan mesti memiliki akses terhadap informasi yang relevan.

2.1.1.2 Pengertian Leverage

Leverage mengindikasikan seberapa besar tingkat aset yang diongkosi oleh utang. Tingkat leverage bisa diketahui melewati perbandingan total utang dengan total aset. Perusahaan yang melanggar utang secara potensial menghadapi sekian banyak kemungkinan seperti, bisa jadi percepatan jatuh tempo, penambahan tingkat bunga, dan negosiasi ulang masa utang (Herawaty dan Baridwan, 2007). Namun, leverage memprovokasi tingkat dan variabilitas penghasilan setelah pajak yang selanjutnya memprovokasi tingkat risiko dan pengembalian perusahaan secara keseluruhan. Semakin besar tingkat leverage berarti tingkat ketidakpastian return tinggi, tetapi disisi beda jumlah return yang diserahkan akan semakin besar pula (Van Horne, James C, dan Wachowicz, 2007). Maka dapat diputuskan bahwa, Leverage yang tinggi pun akan menambah perilaku oportunistik manajemen seperti mengerjakan manajemen laba untuk menjaga kinerjanya di mata pemegang saham dan publik dan urusan ini merupakan dampak dari kurangnya pemantauan dan menciptakan manajemen perusahaan lebih susah dalam membuat prediksi jalannya perusahaan ke depan.

2.1.1.3 Pengertian Komite Audit

Berdasarkan keterangan dari Zarka syi (2008) komite audit ialah suatu kumpulan yang sifatnya independen atau tidak mempunyai kepentingan terhadap manajemen dan diusung secara eksklusif serta mempunyai pandangan antara beda bidang akuntansi dan hal-hal beda yang berhubungan dengan sistem pemantauan internal perusahaan. Konsep komite audit mulai diperkenalkan untuk dunia usaha di Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Kemudian pada tahun 1970-an, New York Stock Exchange (NYSE) mulai mewajibkan eksistensi komite audit sebagai persyaratan pencatatan, semenjak itu tidak sedikit negara yang membuat peraturan mengenai komite audit. Sejalan dengan kecenderungan internasional tersebut, persyaratan semacam ini pun telah diputuskan di Indonesia melewati Pedoman Good Corporate Governance yang diterbitkan pada bulan Mei 2002 (Toha, 2004). Keberadaan komite audit ditata melalui Surat Edaran Bapepan Nomor SE- 03/PM/2002 (bagi perusahaan publik) dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002 (bagi BUMN). Komite Audit terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketahui oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan mempunyai latar belakang akuntansi dan keuangan. Selanjutnya Chandra (2006) melafalkan komite yang bisa dibentuk, antara lain:

1. Komite audit meyakinkan terselenggaranya efektifitas dari pengendalian intern, pengamalan tugas eksternal auditor dan internal auditor.
2. Komite Nominasi yang merangkai kriteria seleksi dan formalitas nominasi anggota Komisaris dan Direksi dan eksekutif lainnya, merancang sistem penilaian, dan menyerahkan rekomendasi mengenai jumlah direksi dan komisaris.

3. Komite Remunerasi yang memutuskan arahan dalam penyusunan sistem penggajian dan pemberian tunjangan serta rekomendasi atas evaluasi sistem remunerasi, pemberian saham, sistem pensiun dan kompensasi dalam permasalahan pengurangan pegawai.
4. Komite Asuransi dan Resiko Usaha yang mengerjakan penilaian rutin dan pemberian rekomendasi resiko usaha dan jenis serta jumlah asuransi. Mengenai komposisi atau jumlah dewan direksi, dalam pedoman good corporate governance tidak ditetapkan secara kuantitatif, jumlah anggota direksi mesti dicocokkan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap menyimak efektifitas dalam pemungutan keputusan. UUPT melafalkan Dewan direksi diusung untuk jangka masa-masa tertentu dan dapat diusung kembali. Dalam pengamalan tugasnya, komite audit mempunyai faedah membantu dewan komisaris guna (1) menambah kualitas laporan keuangan, (2) membuat iklim disiplin dan pengendalian yang bisa mengurangi peluang terjadinya pembiasan dalam pengelolaan perusahaan, (3) menambah efektifitas faedah internal audit (SPI) maupun eksternal audit, serta (4) mengidentifikasi hal-hal yang membutuhkan perhatian dewan komisaris atau pengawasan. Chandra (2006) melafalkan tujuan dibentuknya komite audit mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan

Meskipun direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab khususnya atas penyusunan laporan finansial dan auditor eksternal bertanggung jawab atau audit eksternal laporan keuangan, komite audit mengemban pengawasan independen atas proses penyusunan laporan finansial dan pengamalan audit eksternal.

2. Manajemen Resiko dan Kontrol

Meskipun direksi dan dewan komisaris khususnya bertanggung jawab atas manajemen resiko dan kontrol, komite audit menyerahkan pengawasan independen atas proses pengelolaan resiko dan kontrol.

3. Corporate governance

Meskipun direksi dan dewan komisaris yang bertanggung jawab atas pengamalan corporate governance, tetapi komite audit mengemban pengawasan independen atas proses pengamalan corporate governance.

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti berasumsi bahwa komite audit ialah organ perseroan yang bertugas

- (1) Meningkatkan kualitas laporan keuangan,
- (2) Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang bisa mengurangi peluang terjadinya pembiasan dalam pengelolaan perusahaan,
- (3) Meningkatkan efektifitas faedah internal audit (spi) maupun eksternal audit, serta mengidentifikasi hal-hal yang membutuhkan perhatian dewan komisaris atau pengawasan.

2.1.1.4 Pengertian Dewan Komisaris Independen (DKI)

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk mengerjakan pengawasan dan menyerahkan nasihat untuk direksi serta meyakinkan bahwa perusahaan mengemban good corporate governance. Namun, dewan komisaris jangan turut serta dalam memungut keputusan operasional. Kedudukan setiap anggota dewan komisaris tergolong komisaris utama ialah setara. Berdasarkan keterangan dari KNKG (2006), supaya pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berlangsung secara efektif, perlu diisi prinsip-prinsip berikut:

1. Komposisi dewan komisaris mesti memungkinkan pemungutan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, sertadapat beraksi independen.

2. Anggota dewan komisaris mesti profesional, yakni berintegritas dan memiliki keterampilan sehingga bisa menjalankan kegunaannya dengan baik tergolong meyakinkan bahwa direksi telah menyimak kepentingan seluruh pemangku kepentingan.
3. Fungsi pemantauan dan pemberian nasihat dewan komisaris merangkum tindakan pencegahan, perbaikan, sampai untuk pemberhentian sementara. Jumlah dari dewan komisaris bisa disesuaikan dengan suasana perusahaan. Dewan komisaris bisa terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai komisaris independendan komisaris yang terafiliasi. Pihak yang terafiliasi ialah pihak yang memiliki hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan. Jumlah komisaris independen mesti bisa menjamin supaya mekanisme pemantauan berjalan secara efektif dan cocok dengan ketentuan perundang-undangan. Salah satu dari komisaris independen mesti memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan.

2.1.2 PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian tentang manajemen laba telah tidak sedikit dilakukan. Adapun riset – riset yang telah dilaksanakan dan relevan dengan riset ini antara beda sebagai berikut:

NO	JUDUL	NAMA PENELITI	METODE PENELITI	HASIL PENELITIAN
1.	‘’Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Manajemen Laba Dengan <i>Corporat e</i>	Naftalia(2013)	Regresi linier berganda	<i>Leverage</i> berpengaruh terhadap manajemen laba dengan nilai signifikansi sebesar 0,034 dan nilai <i>unstandardized coefficients beta</i> 0,245. Nilai adjusted R Square pada penelitian ini

	<p><i>Governance</i> Sebagai Variabel Pemoderasi”</p>			<p>sebesar 0,053. Nilai F statistik sebesar 4,717 dan tingkat signifikansi F sebesar 0,048 Penelitian ini konsisten dengan penelitian Widyaningdyah (2001) dan Watiningsih (2011). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi <i>leverage</i> maka semakin tinggi tindakan manajemen laba. Hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian menyatakan bahwa <i>Leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Laba.</p>
2.	<p>“Analisis Pengaruh <i>Firm Size</i>, <i>Leverage</i>, <i>Good Corporate Governance</i>, dan Profitabil</p>	<p>Perdana (2012)</p>	<p>Regresi linier berganda</p>	<p>Kualitas Audit dan <i>Leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa kualitas audit dan DER berpengaruh negatif signifikan terhadap</p>

	<p>i t a s Terhadap <i>Earning Management</i>".</p>			<p>praktik manajemen laba.</p>
3.	<p>"Moderasi <i>Good Corporate Governance</i> Pada Pengaruh Antara <i>Leverage</i> Dan Manajemen Laba".</p>	<p>Sari dan Astika (2015)</p>	<p>Regresi linier berganda</p>	<p>a. <i>L e v e r a g e</i> berpengaruh positif signifikan dengan nilai 0.000 yaitu lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ yang berarti <i>l e v e r a g e</i> berpengaruh positif signifikan pada manajemen laba.</p> <p>b. Koefisien regresi dari variabel interaksi antara <i>leverage</i> dan faktor GCG adalah 0,100 dan signifikansinya adalah 0,002 yaitu lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, variabel faktor GCG berpengaruh pada pengaruh antara <i>leverage</i> dan manajemen laba. Nilai koefisien</p>

				<p>variabel interaksi antara <i>leverage</i> dan faktor GCG sebesar 0,100 (lebih rendah dari beta <i>leverage</i> sebesar 0,192) menunjukkan variabel faktor GCG memperlemah pengaruh <i>leverage</i> pada manajemen laba, karena <i>beta</i> dari variabel interaksi lebih kecil dari beta <i>leverage</i></p>
4.	<p>“Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia”</p>	<p>Nasution dan Setiawan (2007)</p>	<p>Regresi linier berganda</p>	<p>a. Komposisi dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan 0,067 akan terjadinya manajemen laba di perusahaan perbankan. b. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif secara signifikan 0,081 terhadap tindak manajemen laba yang dilakukan dalam perusahaan perbankan. c. Komite audit</p>

				berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba yang terjadi dalam perusahaan perbankan dengan nilai signifikan sebesar 0,011.
5.	Internal Audit, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Anak Perusahaan	Nugrahani (2013)	Regresi linier berganda	internal audit, independensi dewan komisaris, jumlah pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>fee</i> audit. Ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, karakteristik auditor (BIG4), ukuran perusahaan dan anak perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap <i>fee</i> audit

Sumber : Data Diolah, 2018

b.4.3 Kerangka Berpikir

1) Pengaruh Leverage terhadap Manajemen Laba

Leverage adalah pengukur besarnya aktiva yang diingkosi dengan hutang. Dengan semakin banyaknya hutang maka manajemen mesti bisa lebih meyakinkan pihak kreditur bahwa

perusahaan tetap dapat membalikkan pokok pinjaman beserta bunganya. Leverage yang tinggi akan dominan dengan nilai pembiayaan yang pun tinggi dengan maksud untuk menjaga kinerja finansial perusahaan dalam jangka panjang, dengan menjaga kinerja perusahaan tersebut, diinginkan kreditur pun akan tetap memiliki keyakinan terhadap manajemen perusahaan (Subhan, 2011). Besarnya tingkat hutang perusahaan (leverage) dapat memprovokasi tindakan manajemen laba. Jika tingkat keharusan yang tinggi menjadikan pihak manajemen perusahaan menjadi lebih susah dalam menciptakan prediksi jalannya perusahaan kedepan. Jadi, dapat diputuskan bahwa leverage menjadi salah satu hal yang dominan terhadap praktik manajemen laba sebab semakin tinggi hutang perusahaan semakin tidak sedikit kesempatan perusahaan mengerjakan praktik manajemen laba.

2) Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan kerangka dasar hukum di Indonesia perusahaan publik diharuskan untuk menyusun komite audit. Komite Audit tersebut diciptakan oleh Dewan Komisaris. Oleh sebab itu, seluruh perusahaan publik adalah milik masyarakat luas. Bahkan, perusahaan-perusahaan yang tercebur dalam kegiatan sehari-hari diluar bursa efek pun terkena keharusan untuk menyusun komite audit yang di antara tugasnya sehubungan dengan audit eksternal bersangkutan dengan audit internal dan pengendalian intern. Dari definisi tersebut, maka bisa mengambil benang merah bahwa komite audit memiliki pandangan mengenai masalah-masalah yang bersangkutan dengan akuntansi, laporan keuangan, serta menyerahkan penjelasan dan mengerjakan pengawasan terhadap internal serta auditor independen. Becker dkk. dalam Herawaty (2008) mengaku bahwa klien dari auditor Non Big 6 mengadakan discretionary accrual yang secara rata-rata lebih tinggi dari yang diadakan oleh klien auditor Big 6. Namun pada saat riset ini dilangsungkan Big 6 telah pulang menjadi Big

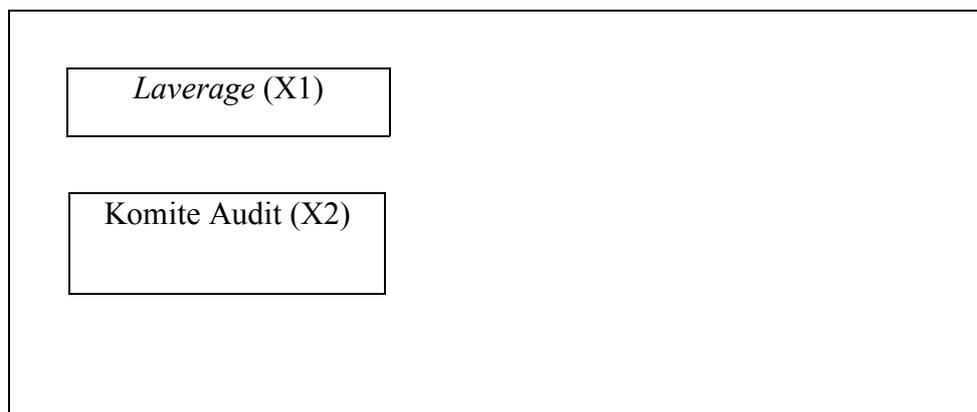
4. Jadi, dapat diputuskan dari keterangan tersebut bahwa kualitas auditor bisa memperkuat pengaruh leverage terhadap manajemen laba.

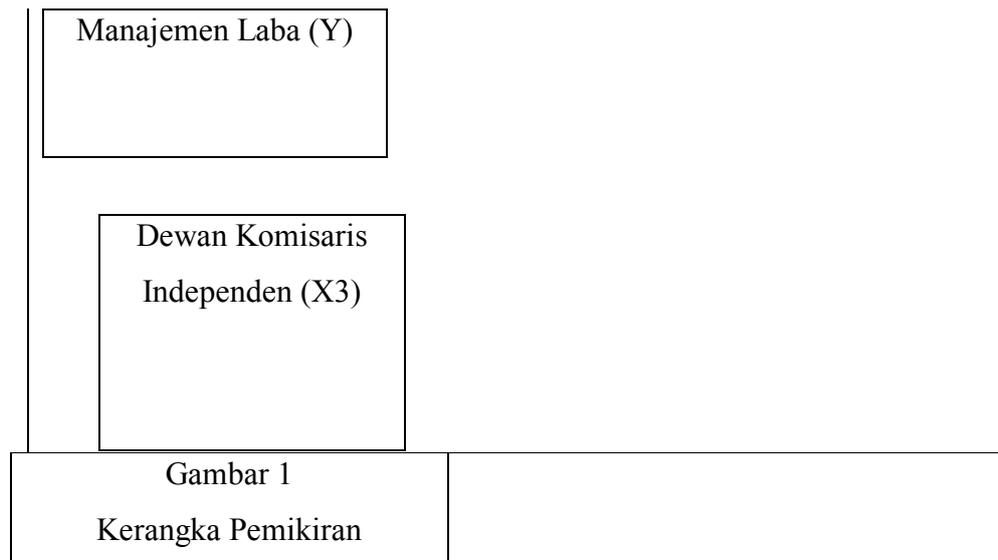
3) Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba

Dewan komisaris adalah pihak yang memastikan pelaksanaan strategi perusahaan dan megawasi manajemen dalam pengelolaan perusahaan serta memastikan terlaksananya akuntabilitas. Penelitian ini memakai dewan komisaris independen sebab dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat memprovokasi kemampuannya untuk beraksi independen atau semata-mata guna kepentingan pihak tertentu. Dengan proporsi jumlah dewan komisaris independen pada sebuah perusahaan bakal memperkuat pengaruh leverage terhadap manajemen laba. Berdasarkan keterangan tersebut dapat diputuskan bahwa eksistensi dewan komisaris independen bisa memperkuat pengaruh leverage yang dilaksanakan manajemen untuk mengerjakan manajemen laba.

Paradigma Penelitian

Untuk mencerminkan pengaruh leverage terhadap manajemen laba dengan corporate governance sebagai variabel moderasi maka, dibuat suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:





2.2 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan tentang kerangka pemikiran dan paradigma riset sebelumnya, maka hipotesis yang dikemukakan sebagai jawaban sedangkan terhadap rumusan masalah riset ini merupakan sebagai berikut:

1. H1: Leverage dominan terhadap Manajemen Laba pada perusahaan perbankan yang tercatat di BEI.
2. H2: Dewan Komisaris Independen dominan terhadap Manajemen Laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.
3. H3: Komite Audit dominan terhadap Manajemen Laba pada perusahaan perbankan yang tercatat di BEI.